

Kode/ Nama Rumpun Ilmu : 561 / Ekonomi Pembangunan

Executive Summary



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI
DI KABUPATEN JEMBER ERA OTONOMI DAERAH**

Tahap ke-2

Tim Pengusul

Nama Ketua : Drs. Agus Luthfi, M.Si / 0022056505

Anggota : Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes / 0006125810

UNIVERSITAS NEGERI JEMBER

Desember, 2014

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI DI
KABUPATEN JEMBER ERA OTONOMI DAERAH**

Nama Ketua Peneliti : Drs. Agus Luthfi, M.Si
Anggota Peneliti : Sunlip Wibisono, M.Kes
Mahasiswa Terlibat : Kukuh Danuargo Priyambodo
Muhamad Nugraha
Universitas : Universitas Jember

Abstrak

Implementasi otonomi daerah merupakan langkah yang dijadikan prioritas utama pemerintah dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi di masing-masing wilayah Indonesia. Sementara itu, dalam menunjang kebijakan tersebut diperlukan penguatan ekonomi melalui sektor industri. Kabupaten Jember merupakan wilayah yang memiliki potensi di sektor primer, sehingga sektor industri sangat penting dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan arah strategi industrialisasi yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Jember. Berdasarkan analisis yang menggabungkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis *Strengths Weaknesses Opportunities Treats (SWOT)* dan *deep interviews*, ditemukan bahwa sektor pertanian belum optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemetaan ulang produk potensial yang dapat menjadi input bagi pengembangan industri melalui pembinaan industri dengan menitikberatkan pada pembinaan manajemen, akses permodalan serta pemasaran produk. Strategi agribisnis yang mampu mengolah hasil pertanian, akan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dan menciptakan pasar berbasis pertanian serta mampu bersaing dengan produk lain secara luas. Strategi pengembangan industri melalui peningkatan sentra agribisnis yang ada dan membentuk sentra yang baru sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, dipengaruhi oleh sistem manajemen, kelembagaan, efisiensi dalam biaya maupun penggunaan faktor produksi dan efektifitas dalam menghasilkan output serta pemasarannya.

Kata kunci: Agribisnis, Pemasaran, Pembinaan, Sentra.

RINGKASAN

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menurut teori yang dikemukakan Lewis (1954) bahwa dalam proses transformasi industrialisasi merupakan tahap awal dalam pembangunan ekonomi melalui sektor pertanian (tradisional) dan industri (modern) yang terjadi antara daerah perdesaan dan perkotaan. Visi dan tujuan dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RAPERDA RTRW) Kabupaten Jember, yang menempatkan industri sebagai sektor basis. Sektor pertanian merupakan sektor basis, kemudian sektor kedua sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar dan terbesar ketiga adalah sektor jasa. Keterkaitan antar sektor, semakin tinggi keterkaitan semakin tinggi eksternalitas dan semakin tinggi pula timbulnya *multiplier effect*. Teori ekonomi dan fakta yang berkembang menyebutkan bahwa industrialisasi merupakan sebuah solusi untuk mengurangi pengangguran, baik yang bersifat *visible* maupun yang *disguised* (terselubung). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui industri apa yang tepat dikembangkan dan bagaimanakah strategi dan kebijakan industrialisasi di Kabupaten Jember. Metode analisis penelitian ini metode *deep interview* (wawancara) dan SWOT analisis yang merupakan analisis kondisi internal eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja.

Analisis SWOT untuk mengumpulkan persepsi dan penilaian ahli (*expert*) terhadap faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap matriks kuadran strategi analisis IFAS-EFAS, Kabupaten Jember terletak pada kuadran I. Kuadran I menunjukkan nilai positif, menandakan kinerja dari sektor industri berjalan dengan baik di Kabupaten Jember. Kondisi yang kuat dan berpeluang untuk berkembang, maka strategi pengembangan industri yang tepat untuk di aplikasikan pada Kabupaten Jember adalah strategi progresif, artinya dalam kondisi prima dan tepat Kabupaten Jember dapat melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Wawancara oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pemetaan ulang tentang produk potensial di Kabupaten Jember yang dapat menjadi input bagi pengembangan industri serta pemetaan potensi industri yang telah berkembang di Kabupaten Jember, seperti industri Batik di Sumberjambe, Manik-manik dan tasbeh di Balung. Kebijakan untuk mengembangkan dan

membina industri yang ada, khususnya IKM dan UMKM, pembinaan dititik beratkan pada pembinaan manajemen dan akses permodalan serta pemasaran produk.

Potensi yang dimiliki dan kemungkinan pengembangannya dalam menghadapi persaingan usaha di masa yang akan datang, maka pengembangan industri di Kabupaten Jember diarahkan pada agribisnis, agroindustri, pariwisata dan usaha ekonomi produktif. Arahan kebijakan hasil kompilasi dari data, informasi, diskusi dengan pihak eksekutif dan legislatif, sebagai berikut :

1. Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM) dengan arah kebijakan: a) mewujudkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta kualitas pelayanan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, handal dan berakhlak mulia dan mampu menciptakan tenaga kerja yang mandiri, produktif, berdaya saing dengan memperhatikan aspek perlindungan bagi tenaga kerja serta pengusaha.
2. Mengembangkan agribisnis berkelanjutan yang unggul, efisien, berdaya saing tinggi, dan berbasis sumberdaya lokal melalui pengembangan sistem agribisnis diarahkan pada pengembangan hubungan subsistem hulu dan subsistem hilir dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi agribisnis sehingga memiliki daya saing dalam memenuhi kebutuhan pasar.
3. Menumbuhkan usaha ekonomi produktif secara merata berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal, terintegrasi, berdaya saing dan berkelanjutan, meliputi: a) penataan struktur industri diarahkan pada pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui kerjasama kemitraan dengan industri besar; b) optimalisasi perdagangan diarahkan pada peningkatan sistem distribusi dan informasi agar ketersediaan kebutuhan pokok di daerah yang terjangkau dan meningkatkan akses pasar bagi produk daerah; c) pengembangan pariwisata pengembangan sarana dan prasarana, obyek dan daya tarik wisata, kelembagaan serta promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan.
4. Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan, meliputi: a) pengembangan sumber daya alam hayati diarahkan untuk peningkatan nilai tambah dan pelestarian keanekaragaman hayati; b) pengembangan energi diarahkan untuk pemenuhan, pemerataan distribusi energi dan pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Era otonomi daerah yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berawal dari pembangunan yang sebelumnya mengalami kesenjangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa serta antar Indonesia Barat dan Indonesia Timur (Badrudin, 2012). Dalam Waluyo (2007), kesenjangan tersebut disebabkan ketidakmerataan dalam alokasi investasi yang ada di tiap wilayah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan kebijakan yang tepat untuk mengatasi kesenjangan melalui peran lebih untuk daerah baik dari pemerintah maupun pelaku ekonomi sebagai proses pembangunan ekonomi untuk daerah (Nugroho, 2004: 195-199). Peran lebih bagi daerah merupakan upaya pembangunan ekonomi dan pengembangan potensi daerah atau lokal berdasarkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat daerah.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menurut teori yang dikemukakan Arthur Lewis (1954) bahwa dalam proses transformasi industrialisasi merupakan tahap awal dalam pembangunan ekonomi melalui sektor pertanian (tradisional) dan industri (modern) yang terjadi antara daerah perdesaan dan perkotaan (Badrudin, 2012; Jhingan, 2003:156-158). Sektor pertanian yang ada di perdesaan memiliki subsisten jumlah penduduk yang berlebihan dan ditandai adanya produktivitas marginal tenaga kerja sebesar nol serta tingkat upah riil yang rendah, sedang sektor industri yang ada di perkotaan memiliki produktivitas marginal tinggi dan menjadi tempat penyerapan tenaga kerja yang tinggi (Sukirno, 2006:196; Hakim, 2002:95). Kondisi tersebut mengakibatkan perekonomian akan beralih (migrasi) dari sektor pertanian di perdesaan ke sektor industri yang ada di perkotaan.

Visi dan tujuan dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RAPERDA RTRW) Kabupaten Jember, yang menempatkan industri sebagai sektor basis. Industrialisasi dimaksudkan untuk melakukan akselerasi hasil-hasil pembangunan, dengan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat (PERDA Kabupaten Jember, 2013). Berdasarkan data PDRB Kabupaten Jember (2013), distribusi presentase PDRB Kabupaten Jember, menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan pada tahun 2012 sebesar 10,52% kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 10,55%. Sektor pertanian

mengalami penurunan yang awalnya pada tahun 2012 distribusinya sebesar 37,76% menjadi 36,75%.

Kabupaten Jember dalam penelitian Luthfi (2013) pada tahap ke-1, menggunakan metode deskripsi dan trend, LQ serta *shift share* menemukan bahwa terdapat perbedaan dalam tiap analisisnya terutama berkaitan dengan sektor basis atau sektor unggulan. Pada metode deskriptif, ditemukan bahwa sektor dengan kontribusi terbesar pada PDRB adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Metode trend menunjukkan perubahan sektoral cenderung dari sektor pertanian ke sektor perdagangan hotel dan restoran. Metode LQ, dalam periode analisis terdapat empat sektor unggulan yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor keuangan, persewaan dan jasa keuangan serta sektor jasa-jasa. Dengan metode *shift share*, sektor pertanian tetap menjadi sektor basis, kemudian sektor kedua sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar dan terbesar ketiga adalah sektor jasa. Dalam rantai pembangun ekonomi berada pada posisi hilir (atau sektor tersier) (Luthfi, 2013).

Ekternalitas muncul karena adanya keterkaitan antar sektor, ekternalitas akan menimbulkan efek pengganda (*multiplier effect*). Semakin tinggi keterkaitan semakin tinggi ekternalitas dan semakin tinggi pula timbulnya *multiplier effect*. Kabupaten Jember dengan penduduk sebanyak 2.179.829 jiwa (Bappekab Jember, 2011), 11 Perguruan Tinggi menjadi Pusat Perkembangan Wilayah dalam RTRW Propinsi, serta dengan berbagai potensi sumberdaya alam yang beragam, baik dari hasil perkebunan, perikanan, peternakan, pertanian pangan dan pertambangan serta *godwill* Pemerintah daerah dalam pengembangan industrialisasi, maka perlu ada suatu kajian yang mampu menjawab kemungkinan pengembangan industrialisasi dan menemukan strategi dan kebijakan pengembangan industri.

Teori ekonomi dan fakta yang berkembang menyebutkan bahwa industrialisasi merupakan sebuah solusi untuk mengurangi pengangguran, baik yang bersifat *visible* maupun yang *disguised* (terselubung). Industrialisasi akan menyebabkan potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Jember disemua sektor akan mampu diberdayakan, baik potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya modal, teknologi dan akan memacu berkembangnya *enterpreneur* pada semua level. Permasalahannya adalah: a) industri apa

yang tepat dikembangkan di Kabupaten Jember; b) bagaimanakah strategi dan kebijakan industrialisasi di Kabupaten Jember.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam arti luas industri didefinisikan sebagai kumpulan dari perusahaan-perusahaan sejenis. Dengan pemahaman seperti ini semua sektor dari perekonomian bisa dikatakan sebagai sebuah industri tersendiri, misalnya industri barang-barang konsumsi, industri peralatan kapital, industri pertanian, ataupun industri jasa. Industri dalam arti sempit adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang memproduksi barang-barang yang secara umum disebut sebagai barang-barang industri, dalam sektor yang dikenal sebagai sektor ekonomi modern (Hakim, 2004). Menurut Dumairy (1996) dalam istilah ekonomi, industri mempunyai dua pengertian. Pertama, industri merupakan himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, contoh industri kertas berarti himpunan perusahaan-perusahaan penghasil kertas. Kedua, industri adalah sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ketika satu negara telah mencapai tahapan dimana sektor industri sebagai *leading sektor* maka dapat dikatakan negara tersebut sudah mengalami industrialisasi (Yustika, 2000). Dapat dikatakan bahwa industrialisasi sebagai transformasi struktural dalam suatu negara. Proses industrialisasi dapat didefinisikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi dimana terdapat kenaikan kontribusi sektor industri dalam permintaan konsumen, PDB, ekspor dan kesempatan kerja (Chenery, 1986).

Indonesia dapat menjadi negara industri maju jika memiliki beberapa kriteria dasar, antara lain: 1) memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian nasional, 2) IKM memiliki kemampuan yang seimbang dengan industri besar, 3) memiliki struktur industri yang kuat, 4) teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar, 5) telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya saing internasional industri, dan 6) telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara APEC. Tahun 2020 diharapkan kontribusi industri non-migas terhadap PDB mampu mencapai 30%, dimana kontribusi industri kecil (IK) ditambah industri menengah (IM) sama atau mendekati kontribusi industri besar (IB). Selama kurun waktu 2010 - 2020 industri harus tumbuh rata-rata 9,43% dengan

pertumbuhan IK, IM, dan IB masing-masing minimal sebesar 10,00%, 17,47%, dan 6,34% (Kemenprin, 2012).

Perroux mengatakan, pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Menurut Perroux (Arsyad, 2004) adalah sebagai berikut : a) dalam proses pembangunan akan timbul industri pemimpin yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. Keterkaitan antar industri sangat erat, maka perkembangan industri pemimpin akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan industri pemimpin tersebut; b) pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya; c) perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung dari industri pemimpin atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif.

Industrialisasi telah berkembang pesat diberbagai belahan dunia, bahkan hampir semua negara yang maju telah mengembangkan pembangunan berbasis industri. Struktur ekonomi akan mengalami perubahan dalam proses pembangunan ekonomi. A.G.B Fisher menyatakan bahwa di berbagai negara dapat dibedakan berdasarkan persentase tenaga kerja yang berada di sektor primer, sekunder, dan tersier. Clark menyatakan makin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, makin kecil peranan sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja. Sektor industri makin penting peranannya dalam menampung tenaga kerja. Kuznets menunjukkan adanya perubahan sumbangan berbagai sektor kepada produksi nasional dalam proses pembangunan (Sukirno, 2006). Chenery dan Syrquin melihat corak perubahan peranan berbagai sektor dalam proses pembangunan negara sedang berkembang. Sumbangan sektor pertanian kepada produksi nasional telah menurun di 12 dari 13 negara. Umumnya pada permulaan peranan sektor pertanian mendekati 1/2 dan ada yang mencapai 2/3. Kemudian diakhir observasi mencapai 20% atau kurang. Di 12 negara peranan sektor industri dalam menghasilkan produksi nasional meningkat. Pada awal hanya 20% – 30% menjadi 40% - 50%. Sumbangan sektor jasa

dalam menciptakan pendapatan nasional tidak mengalami perubahan yang berarti dan perubahan itu tidak konsisten sifatnya (Sukirno, 2006). Faktor Penyebab Perubahan struktur ekonomi dari berbasis pertanian menjadi berbasis industri adalah: a) sifat manusia dalam kegiatan konsumsinya, yaitu apabila pendapatan naik, elastisitas permintaan yang diakibatkan perubahan pendapatan menjadi rendah untuk konsumsi atas bahan-bahan makanan, sedangkan permintaan bahan-bahan pakaian, perumahan dan barang hasil konsumsi sebaliknya (hukum Angells); b) Perubahan struktur ekonomi disebabkan perubahan teknologi yang terus menerus berlangsung. Perubahan teknologi yang terjadi akan menimbulkan perubahan struktur produksi yang bersifat *compulsory* dan *inductive*; c) perubahan teknologi yang terus menerus berlangsung. Perubahan teknologi yang terjadi akan menimbulkan perubahan struktur produksi dan pola konsumsi pada barang industri. Perkembangan teknologi industri jauh lebih cepat daripada teknologi pertanian (Sukirno, 2006). Schumpeter menganggap bahwa perkembangan teknologi tidaklah linier, tetapi bersifat spontan dan terputus-putus, oleh karenanya perkembangan industrialisasi lebih menjanjikan dibandingkan sektor pertanian (Jhinghan, 2002).

Teori modernisasi difusionis merupakan model “pusat pinggir” (*core-periphery*) dari Pebrisch (1949) yang dikembangkan oleh Friedman (1969) menjadi “teori pembangunan regional”; konsep “kutub pertumbuhan” (*growth poles*) dari Perroux (1950) dan “pusat pertumbuhan” (*growth centres*) dari Boudeville; serta geografi dari mazhab modernisasi yang dipimpin oleh Soja (1968), Gould (1970), Ridell (1970) dan Berry (1972) (Badrudin, 2012). Penekanan teori ini pada “difusi pertumbuhan spasial” yang menghasilkan inovasi diseluruh ruang perekonomian dari pangkalan terdepan semula. Dilihat dari tingkat-tingkat pengembangan antara daerah di pedalaman (perdesaan) serta di daerah perkotaan antar kawasan dalam suatu negara, terdapat beberapa ketidakseimbangan atau banyak terjadi ketimpangan. Banyak perencanaan yang pada mulanya tidak bersifat keruangan dan tidak memperhitungkan lokasi pengembangan yang menjadi sasaran proyek. Tanpa penegendalian atau kepedulian pada aspek-aspek keruangan, proyek-proyek baru cenderung terletak di tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang paling menarik dan banyak menguntungkan. Keadaan ini akan meningkatkan atau mengintensifkan pola *inti-pinggiran* (*core-periphery*), dalam suatu negara, sehingga keuntungan pembangunan cenderung terpusat pada suatu “wilayah” dari pada menyebar.

Teori modernisasi berusaha mewujudkan perpindahan/transisi negara-negara dengan basis pertanian kebasis industri. Teori pembagian kerja secara internasional pada dasarnya menyatakan bahwa setiap negara harus melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan keuntungan komperatif yang dimiliki. Akibat teori ini terjadilah spesialisasi produksi pada tiap-tiap negara. Oleh karena itu secara umum di dunia ini terdapat dua kelompok negara, yakni negara yang memproduksi hasil-hasil pertanian dan negara-negara yang memproduksi barang-barang industri. Antara kedua kelompok negara ini terjadi hubungan dagang yang harapannya saling menguntungkan (Budiman, 1995: 16-17).

Pengamatan Hakim (2004) terhadap transformasi struktural antar sektor, bahwa meningkatnya pendapatan perkapita, sektor pertanian mengalami penurunan pangsa pasar terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) sedangkan sektor industri sebaliknya mengalami peningkatan. Masalahnya adalah sektor mana yang harus diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi. Pada umumnya sektor pertanian dan industri dipandang sebagai dua tujuan yang saling bertentangan. Tetapi Sutcliffe (1971, dalam Hakim, 2004) menyatakan bahwa konflik tersebut bukanlah sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan bahwa prioritas atas dua sektor tersebut tidak harus dipertentangkan.

Kebanyakan negara sedang berkembang pembangunan industri dan pertanian sebisa mungkin berjalan secara simultan. Pertanian menyediakan pasar bagi barang-barang manufaktur, memenuhi kebutuhan pangan penduduk perkotaan, menjadi sumber tenaga kerja dan kapital untuk sektor industri, serta menghasilkan devisa untuk impor mesin-mesin dan bahan baku intermediate yang diperlukan oleh sektor industri. Sebaliknya sektor industri menyediakan *suply input* yang diperlukan untuk memodernisasi sektor pertanian, menyediakan barang-barang konsumen yang dibutuhkan oleh penduduk sektor pertanian di pedesaan serta menjadi pasar bagi output pertanian baik dalam bentuk konsumsi maupun sebagai input proses produksi untuk diproses lebih lanjut. Hal ini yang dikatakan sebagai strategi pembangunan seimbang antara dua sektor.

Paul Baran (1957, dalam Hakim, 2004) berargumentasi bahwa dibawah kondisi perekonomian yang direncanakan terpusat, tidak bisa dipertanyakan apakah pembangunan harus dilangsungkann melalui industrialisasi atau melalui perbaikan dalam pertanian. Dia hanya bisa terjadi dengan sebuah upaya simultan dalam dua arah. Kebijakan investasi harus menempatkan tekanan utamanya pada pembangunan industri pada waktu yang sama

mengangkat pertanian cukup tinggi untuk mendukung proses industrialisasi sehingga pada akhirnya sektor industri bisa ganti memberikan dukungan pada sektor pertanian dengan pertolongan sumber daya yang berekspansi dari produksi industrial.

Teori Perroux (1970, dalam Arsyad, 2004) tentang pusat pertumbuhan. Pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut sebagai pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Inti teori Perroux adalah: a) proses pembangunan akan timbul industri pemimpin yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. Karena keterkaitan antar industri sangat erat, maka perkembangan industri pemimpin akan mempengaruhi industri lain yang berhubungan erat dengan industri pemimpin tersebut; b) pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya; c) perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (industri pemimpin) dengan industri-industri yang relatif pasif, yaitu industri yang tergantung dari industri pemimpin atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif.

Asmarani (2010), dalam penelitiannya tentang “Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten: Pendekatan Analisis SWOT dan AHP” dapat disimpulkan bahwa: hasil analisis terhadap pembobotan pada kuesioner SWOT ditemukan strategi alternatif yang dapat di rekomendasikan dari memanfaatkan kekuatan untuk meningkatkan peluang, seperti dengan mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian/lumbung padi bagi Provinsi Jawa Tengah, dengan memaksimalkan teknologi yang semakin berkembang sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas unggul, serta memanfaatkan kerja sama dengan daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Klaten. Prioritas kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut: memperkuat ekonomi mikro; memanfaatkan segala sumber daya untuk mengoptimalkan otonomi daerah; memperbaiki kinerja lembaga.

Syahrudin, dalam penelitiannya tentang “Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten

Mamuju Provinsi Sulawesi Barat” dapat disimpulkan bahwa: berdasarkan analisis SWOT pilihan strategi yang paling dominan, adalah strategi SO: Strategi memanfaatkan seluruh kekuatan untuk membuat dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya yaitu : meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pelayanan yang optimal; meningkatkan dan mengefektifkan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat secara luas; mengadakan pelatihan bidang perpajakan dan mengadakan pemutakhiran data; menetapkan dan membuat strategi baru dsalam memungut pajak dan lebih memperhatikan kualitas dan pelayanan prima.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis SWOT untuk mengumpulkan persepsi dan penilaian ahli (*expert*) terhadap faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jember. Sehingga dapat ditemukan faktor kekuatan, faktor kelemahan, faktor peluang dan faktor ancaman. Dari penelitian bobot IFAS (*Internal Faktor Analysis System*) dan EFAS (*External Faktor Analysis System*), sehingga dapat ditemukan alternatif strategi yang dapat digunakan dalam upaya pengembangan industrialisasi di Kabupaten Jember.

1. Analisis Deskriptif Faktor Strategi Internal dan Eksternal

Analisis faktor internal terhadap strategi pengembangan industrialisasi di Kabupaten Jember oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember, maka terlebih dahulu melakukan analisis sumberdaya internal atau mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan dan kelemahan seperti berikut.

1. *Strengths* (kekuatan)
 - a. Kondisi Geografis dan topografis menunjang terciptanya titik tumbuh ekonomi serta distribusi barang dan jasa dalam rangka pengembangan industri Kabupaten Jember.
 - b. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang di miliki Kabupaten Jember.
 - c. Sektor pertanian merupakan sektor potensial yang dapat mendukung pengembangan agroindustri maupun agribisnis.
 - d. Terdapatnya fasilitas pendidikan yang menunjang terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.
 - e. Industri kecil dan menengah semakin berkembang di Kabupaten Jember.

- f. Program pengembangan industri didukung dengan adanya kebijakan pemerintah daerah.
2. *Weaknesses* (kelemahan)
 - a. Ketersediaan infrastruktur dasar seperti sarana kesehatan, irigasi, dan jalan raya dalam rangka pengembangan industrialisasi.
 - b. Kapasitas dan kinerja kelembagaan di Kabupaten Jember.
 - c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
 - d. *Training* atau pelatihan diadakan guna meningkatkan skill masyarakat.
 - e. Etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat.
 - f. Teknologi dan pemasaran produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Jember.
 3. *Opportunities* (peluang)
 - a. Berbagai Undang-undang tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam upaya pengembangan industri di Kabupaten Jember.
 - b. Undang-undang baru No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dalam upaya mewujudkan pengembangan IKM di Kabupaten Jember.
 - c. Potensi pariwisata maupun sumber daya alam yang ada sebagai modal dasar pengembangan sektor pariwisata dalam rangka industrialisasi di Kabupaten Jember.
 - d. Kabupaten Jember merupakan jalur lintas selatan mendukung pengembangan industri di Kabupaten Jember.
 - e. Berbagai program pemerintah pusat dalam upaya mendukung pengembangan industri di Kabupaten Jember.
 - f. Kerjasama dengan daerah-daerah seputar Kabupaten Jember dalam upaya mendukung pengembangan industri daerah.
 4. *Threats* (ancaman)
 - a. Pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah dalam rangka memeratakan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Hasil produksi industri di Kabupaten Jember bersaing dengan industri dari wilayah lainnya.
 - c. Kondisi sosial politik mendukung pengembangan industri di Kabupaten Jember.

- d. Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia dalam upaya mendukung pengembangan industri daerah.
- e. Upaya mensosialisasikan potensi daerah kepada pihak luar (swasta atau investor) dalam pengembangan industri.
- f. Kompetisi yang tinggi dalam pengelolaan investasi antar manajer investasi.

2. Hasil Analisis Faktor Strategi Internal dan Eksternal

Dari faktor-faktor strategis internal dan eksternal faktor yang merupakan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang berpengaruh terhadap strategi pengembangan industrialisasi di Kabupaten Jember. Pembobotan dengan menggunakan metode perbandingan berpasangan (*paired comparison*) terhadap faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Perbandingan antar faktor yang ada dengan menggunakan kuantitatif berdasarkan data kuesioner yang telah dihitung (*score*).

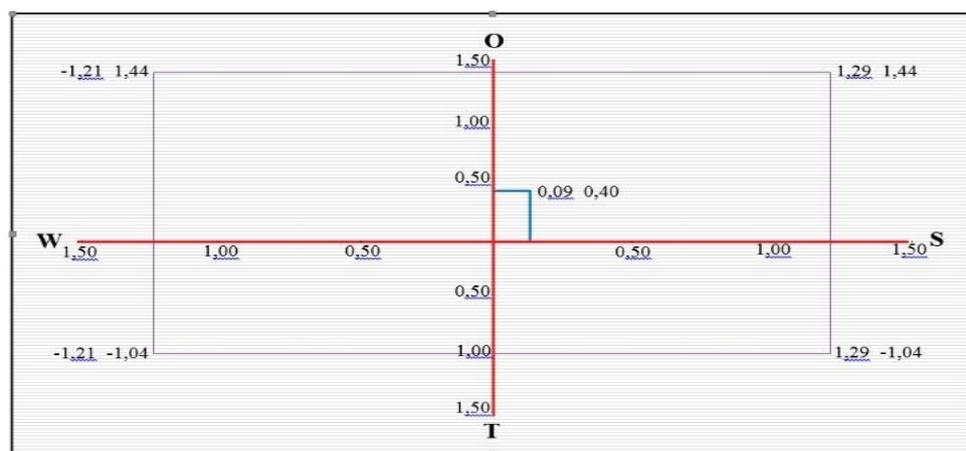
Berdasarkan table dibawah, nilai bobot merupakan hasil kuesioner secara total setiap faktornya, kemudian relative merupakan nilai yang menggambarkan seberapa besar pengaruh faktor tersebut dalam faktor internal (*strengths* dan *weaknesses*) atau eksternal (*opportunities* dan *threats*). Skala merupakan seberapa pentingnya faktor tersebut untuk di prioritaskan sedangkan score merupakan nilai akhir analisis swot yang menunjukkan seberapa besar pengaruh faktor tersebut dalam faktor masing-masing.

Tabel Hasil Analisis SWOT Tiap Faktor

	Bobot	Relatif	Skala	Score
Strenghts	19,70	0,53	2	1,29
Weaknesses	17,50	0,47	3	1,21
Opportunities	18,50	0,55	3	1,44
Threats	15,20	0,45	2	1,04

Secara ringkas hasil perumusan matriks IFAS – EFAS, berdasarkan strategi SO, ST, WO, dan WT, dilakukan pembobotan penilaian untuk menentukan skala prioritasnya. Susunan strategi alternatif berdasarkan urutan prioritasnya. Berdasarkan hasil pemetaan

terhadap matriks kuadran strategi analisis IFAS-EFAS, Kabupaten Jember terletak pada kuadran I. Kuadran I menunjukkan grafik bernilai positif, baik dari sumbu x maupun y, menandakan kinerja dari industrialisasi berdasarkan analisis SWOT berjalan dengan baik di Kabupaten Jember. Kondisi tersebut merupakan kondisi yang kuat dan berpeluang untuk berkembang, maka strategi pengembangan industri yang tepat untuk di aplikasikan pada Kabupaten Jember adalah strategi progresif, artinya dalam kondisi prima dan tepat Kabupaten Jember dapat melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.



Grafik 1. Hasil Analisis SWOT Berdasarkan Kuadran

3. Wawancara Para Ahli Mengenai Industrialisasi di Kabupaten Jember

Responden dari anggota legislatif mengungkapkan bahwa Kabupaten Jember memiliki komoditas andalan adalah tembakau, arah kebijakan pengembangan agribisnis perlu adanya perencanaan yang baik. Pemilihan lokasi industri, perlu perencanaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga akan membawa dampak terhadap wilayah tersebut. Dampak yang di timbulkan dengan adanya pengembangan industri dalam suatu wilayah, memberi dampak positif maupun negatif namun bagaimana caranya dampak negatif tersebut dapat di minimalisir melalui perencanaan yang baik. Selain itu, juga mempertimbangkan dari segi tenaga kerja maupun bahan baku. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan industrialisasi perlu adanya sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Jember, anggota DPR maupun masyarakat yang mampu mengawasi jalannya kebijakan tersebut agar mampu berjalan sesuai dengan visi dan misi Pemkab Jember. Untuk memudahkan pengawasan perkembangan Industri di Kabupaten

Jember memerlukan sebuah kawasan sentra industri yang memiliki pola, alur dan fitur yang sesuai.

Responden dari akademisi di Kabupaten Jember, berpendapat bahwa perlu adanya pemetaan ulang tentang produk potensial di Kabupaten Jember yang dapat menjadi input bagi pengembangan industri serta pemetaan potensi industri yang telah berkembang di Kabupaten Jember, seperti industri Batik di Sumberjambe, Manik-manik dan Tasbeh di Balung. Pemerintah Kabupaten perlu merumuskan kebijakan untuk mengembangkan dan membina industri yang ada, khususnya IKM dan UMKM, pembinaan dititik beratkan pada pembinaan manajemen dan akses permodalan serta pemasaran produk. Oleh karena itu, sentra industri perlu diperluas bila perlu dikaji dibentuknya kawasan pusat industri dengan menawarkan berbagai kemudahan dalam perijinan dan penyediaan infrastruktur.

Anggota LSM di Kabupaten Jember, bahwa keberadaan industri di Kabupaten Jember, yang terus mengalami peningkatan perlu adanya Analisis Dampak Lingkungan atau AMDAL, agar mampu mengurangi dampak negatif yang di timbulkan pembangunan industri tersebut. Sehingga pengembangannya sesuai dengan lokasi strategis (kawasan industri) agar mampu meningkatkan efisiensi dalam pengawasan industri yang ada. Strategi industri yang tepat bagi Kabupaten Jember, adalah agribisnis, sebab pada saat panen raya komoditas unggulan harga barang relatif turun, karena jumlah hasil produksi tanpa diolah yang mengakibatkan cepat rusak. Untuk peningkatan nilai jual, dan mengurangi anjloknya harga maka perlu adanya pengolahan hasil pertanian yang dapat di pasarkan secara luas dan menjadi komoditas unggulan yang bernilai tinggi.

Industri kerajinan yang ada di Desa Panti, merupakan pengrajin dibidang alat kebutuhan rumah tangga, yang terbuat dari seng dengan produk yang dihasilkan seperti, panci, wajan, oven dll. Beberapa pengrajin (merupakan pengrajin dari tiga puluh pengrajin) yang ada di Desa Serut Kec. Panti, memiliki dua orang tenaga kerja kapasitas produksi yang dihasilkan belum mampu mencukupi permintaan pasar yang ada. Dari segi pemasaran, produk yang dihasilkan sudah menyebar diberbagai daerah, bukan hanya wilayah domestik tetapi juga internasional, seperti Negara Malaysia. Kebutuhan produksi tidak bukan menjadi kendala, namun dari sisi manajemen yang kurang baik dalam mengelola keuangan maupun administrasi. Kurangnya program pelatihan dan peningkatan

SDM bagi para pengrajin, yang menjadi salah satu faktor UMKM tersebut belum dapat berkembang dengan baik.

Responden dari sentra industri tasbih maupun manik-manik yang ada di Desa Tutul Kecamatan Balung, merupakan sentra industri yang pemasarannya sudah luas. Jangkauan pemasaran hingga manca negara, barang jadi yang dihasilkan di kirim ke produsen yang ada di Jakarta tanpa menggunakan label, barang yang dijual dihargai perkilogram. Sehingga nilai jual relatif lebih rendah. Bahan baku tasbih maupun kerajinan lainnya terbuat dari tulang, kayu maupun batu karang. Bahan baku dasar batu karang berasal dari Papua, sehingga biaya untuk transportasi bahan baku relatif tinggi.

4. Arah Kebijakan Pembangunan Industri di Kabupaten Jember

Potensi yang dimiliki dan kemungkinan pengembangannya dalam menghadapi persaingan usaha di masa yang akan datang, maka pengembangan industri di Kabupaten Jember diarahkan pada Agrobisnis, Agroindustri, pariwisata dan usaha ekonomi produktif. Arah kebijakan hasil kompilasi dari data, informasi, diskusi dengan pihak eksekutif dan legislatif, sebagai berikut :

1. Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang kreatif, inovatif, handal dan berakhlak mulia, dengan arah kebijakan:
 - a. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta kualitas pelayanan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, handal dan berakhlak mulia.
 - b. Pembangunan moral dan etika diarahkan pada pembentukan akhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi dan bermartabat.
 - c. Arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan tenaga kerja yang mandiri, produktif, berdaya saing dengan memperhatikan aspek perlindungan bagi tenaga kerja serta pengusaha.
2. Mengembangkan agribisnis berkelanjutan yang unggul, efisien, berdaya saing tinggi, dan berbasis sumberdaya lokal meliputi:
 - a. Pengembangan sumberdaya agribisnis diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan teknologi budidaya, teknologi produksi guna peningkatan nilai tambah dan daya saing produk agribisnis.

- b. Pengembangan sistem agribisnis diarahkan pada pengembangan hubungan subsistem hulu dan subsistem hilir dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi agribisnis sehingga memiliki daya saing dalam memenuhi kebutuhan pasar.
3. Menumbuhkan usaha ekonomi produktif secara merata berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal, terintegrasi, berdaya saing dan berkelanjutan, meliputi:
 - a. Penataan struktur industri diarahkan pada pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui kerjasama kemitraan dengan industri besar.
 - b. Optimalisasi perdagangan diarahkan pada peningkatan sistem distribusi dan informasi pasar dalam rangka menjamin ketersediaan kebutuhan pokok di daerah yang terjangkau dan meningkatkan akses pasar bagi produk daerah.
 - c. Peningkatan peran lembaga ekonomi diarahkan untuk peningkatan peran serta lembaga keuangan dalam penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM.
 - d. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru, penguatan wirausaha serta kelembagaan ekonomi dan diversifikasi usaha berbasis potensi lokal.
 - e. Peningkatan investasi diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi, pembangunan infrastruktur ekonomi, penyederhanaan sistem perijinan dan kepastian usaha.
 - f. Pengembangan pariwisata diarahkan untuk pengembangan industri pariwisata dengan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana, obyek dan daya tarik wisata, kelembagaan serta promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan.
4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan, meliputi :
 - a. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kinerja perekonomian daerah, aksesibilitas regional yang dilakukan dengan pendekatan pengembangan wilayah secara terintegrasi agar terwujud pemerataan dan keseimbangan dengan tuntutan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat.
 - b. Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah diarahkan menuju terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang serasi dan konsisten serta dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

- c. Pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan pada terbangunnya infrastruktur ekonomi daerah dalam mendukung realisasi pemerataan pembangunan melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis, dan kawasan budidaya.
5. Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan, meliputi:
- a. Pengembangan sumber daya alam hayati diarahkan untuk peningkatan nilai tambah dan pelestarian keanekaragaman hayati.
 - b. Pengembangan energi diarahkan untuk pemenuhan, pemerataan distribusi energi dan pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan.
 - c. Pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui manajemen pengelolaan yang baik dan berwawasan lingkungan.
 - d. Pemanfaatan sumberdaya alam tak terbarukan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang efisien, bertanggungjawab dan berwawasan lingkungan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

- a. Industrialisasi diperlukan dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi di Kabupaten Jember.
 - a. Industri yang dapat dikembangkan di Kabupaten Jember, adalah jenis industri yang bergerak pada komoditas unggulan yaitu berbasis pada penggunaan bahan-bahan pertanian. Strategi agribisnis yang mampu mengolah hasil pertanian, akan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar, serta menciptakan pasar hasil pertanian yang semakin luas dan mampu bersaing dengan produk lainnya.
 - b. Pengembangan industri di Kabupaten Jember dapat diwujudkan dengan mengembangkan sentra agribisnis yang ada serta membentuk sentra yang baru sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, perlu adanya manajemen, kelembagaan, efisiensi dalam biaya maupun penggunaan faktor produksi dan

efektif dalam menghasilkan output serta pemasarannya. Dalam hal ini, pemerintah daerah memberi arahan, pembinaan dan penyediaan infrastruktur yang diperlukan.

b. Berdasarkan hasil analisis SWOT ditemukan beberapa strategi, yaitu:

a. Strategi *Strenghts- Opportunities* (SO):

1. meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam, pariwisata, maupun pertanian yang ada secara optimal dan berkelanjutan, melalui usaha pembinaan dalam hal manajemen, strategi dan produksi;
2. peningkatan kualitas SDM sebagai pelaku IKM agar sektor perekonomian mikro semakin berkembang dan memperkuat perekonomian daerah;
3. sinergi atau kerjasama yang baik antara IKM, Pemerintah Daerah dan lembaga pendidikan dan pelatihan, dalam hal pendidikan dan keterampilan agar mampu mendukung perbaikan manajemen perusahaan dan meningkatkan kinerja SDM.

b. Strategi *Weaknesses – Opportunities* (WO):

1. peningkatan pelayanan infrastruktur dasar yang ada seperti jalan raya daerah lintas selatan serta sarana prasarana transportasi yang mampu menjangkau kegiatan industri dengan baik dan memadai;
2. peningkatan etos kerja, keuletan maupun jiwa kewirausahaan masyarakat perlu di kembangkan yang mengarah pada pemanfaatan potensi lokal yang ada,
3. peningkatan kinerja kelembagaan yang berpengaruh terhadap industri di Kabupaten Jember, agar mampu meningkatkan industri dari segi konseptual maupun penataan ruang wilayah agar mampu mengurangi dampak negatif dari pengembangan industrialisasi.

c. Strategi *Strenghts – Threats* (ST):

1. pemerataan hasil pembangunan harus seimbang tiap daerahnya melalui pengembangan sektor pertanian menuju arah agribisnis sesuai dengan potensi lokal daerah yang relatif berbeda satu dengan lainnya;
2. Perluasan wilayah pemasaran hasil produksi untuk meningkatkan omzet industri serta perlu adanya media promosi untuk menarik investor untuk menanam modal.

d. Strategi *Weaknesses – Threats* (WT):

1. peningkatan kualitas jalan dengan perbaikan jalan penghubung antar desa dan kabupaten;
2. melakukan sosialisasi (promosi) berbagai sumberdaya potensial i Kabupaten Jember agar mampu meningkatkan investasi di Kabupaten Jember.

6.2 Saran

Rumusan saran atas hasil penelitian ini adalah :

1. Dalam mewujudkan kebijakan industrialisasi di Kabupaten Jember, perlu adanya sinergi yang kuat antar sektor yang saling berhubungan. Sektor pertanian, cenderung mengalami penurunan yang beralih menjadi sektor industri, sehingga untuk mengendalikan sektor pertanian agar tetap mampu menjadi sektor basis, perlu adanya kemampuan sektor industri dalam mendukung kinerja sektor pertanian seperti halnya alat pertanian menggunakan teknologi yang tepat guna yang lebih efisien.
2. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan industri perlu mempertimbangkan keterkaitan antar sektor. Sebagaimana diketahui bahwa perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Jember cenderung dari sektor pertanian ke arah sektor jasa. Oleh karena itu, peningkatan nilai tambah akan diperoleh secara maksimal apabila industri yang dikembangkan harus mampu menjadi penghubung dengan sektor pertanian ataupun potensi sumberdaya alam disisi hulu sebagai faktor produksi dengan sektor jasa (termasuk perdagangan) disisi hilir sebagai pasar bagi output yang dihasilkan oleh IKM. Agribisnis adalah salah satu sektor yang diperkirakan mampu menjadi penghubung antar kedua sektor tersebut.
3. Dalam mewujudkan pengembangan agribisnis di Kabupaten Jember, perlu adanya peningkatan kapasitas produksi yang harus diimbangi dengan strategi pemasaran yang kuat. Pemerintah perlu melakukan pengembangan SDM bagi para pelaku industri melalui pelatihan dan sosialisasi dengan tujuan agar mampu pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan dengan baik dan benar. Disamping itu juga pemerintah daerah perlu membantu membuka pasar dengan pihak luar daerah maupun luar negeri dengan mengadakan promosi ataupun mengikuti pamasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 2004. *Ekonomi Pembangunan. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu*. Yogyakarta: Ekonomi YKPN,
- Asmarani, Asri Dwi. 2010. *Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten: Pendekatan Analisis SWOT dan AHP*". Universitas Indonesia: Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember, 2011, Naskah Akademik Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2011-2031, draft, Jember.
- Badrudin, Rudy. 2013. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia III*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chenery, Hollis. 1986. *Structural Transformation: A Program of Research*. Harvard Institute for International.
- Hakim, Abdul. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Jhingan, M, L. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Perindustrian, 2012, Sambutan Menteri Perindustrian Pada Acara Rapat Kerja Kementerian Perindustrian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2012, Jakarta, 2 Maret 2012;
- Luthfi, Agus. 2013. *Implementasi Kebijakan Industrialisasi di Kabupaten Jember Era Otonomi Daerah*. Jember: Universitas Jember.
- Nugroho, Iwan dan Rochmin. 2014. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Sukirno, Sadono. 2006, *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan)*, Edisi kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Waluyo, Joko. 2007. "*Fiscal Decentralization: Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yustika, Ahmad Erani. 2000. *Industrialisasi Pinggiran, Pustaka Pelajar*. Yogyakarta.